



Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Tebing Tinggi)

Andika Laia^{1*}, Tapi Rumondang Sari Siregar², La Ane³, Muhammad Ridha Habibi Z⁴
¹⁻⁴Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Medan

*Penulis Korespondensi: andikalaia34@gmail.com

Abstract. The research problem arose from the corruption case surrounding the construction of a market wall by the Head of the Tebing Tinggi City Trade Office. The Prosecutor's Office named Gul Bahri Siregar, the former Head of the Tebing Tinggi City Trade, Cooperatives, and Small and Medium Enterprises Office, North Sumatra, a suspect. He is suspected of corruption while working on the retaining wall installation project for the Main Market in Tebing Tinggi City. In addition to Gul Bahri, the Tebing Tinggi District Prosecutor's Office also named Prio Handoko, the project's implementing officer, Deputy Director VII of CV Rizky Mandiri Perkasa, as a suspect. Based on the initial investigation, the perpetrator worked on the project worth Rp 458 million, funded by the 2019 Tebing Tinggi City Regional Budget. This was followed by calculations by the North Sumatra Financial and Development Supervisory Agency. The population in this study was all finance employees in the Regional Apparatus Organizations (OPD) in Tebing Tinggi City. The sample size for this study was 75 respondents. The sampling method used was saturated sampling. The classical assumption test used normality, multicollinearity, heteroscedasticity, and autocorrelation. All questions in the questionnaire were found to be valid and reliable. Furthermore, the data analysis technique used in this study was multiple linear regression and hypothesis testing, including the Coefficient of Determination (R²), the T-test, and the F-test. The results of the study indicate that accountability has a positive and significant effect on regional financial management. Transparency has no significant effect on regional financial management. Human resource competence has a significant, but negative, effect on regional financial management. Simultaneously, accountability, transparency, and human resource competence significantly influence regional financial management. The conclusion of this study is that improving the quality of regional financial management requires strong accountability, effective transparency, and human resource competence, supported by integrity and adequate oversight.

Keywords: Audit; Skill; Clear; Funds; State.

Abstrak. Permasalahan dalam penelitian muncul dari kasus kasus korupsi Pembangunan tembok pasar oleh kadis perdagangan Kota Tebing Tinggi dimana Kejaksaan menetapkan mantan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Gul Bahri Siregar, menjadi tersangka korupsi. Dia diduga terlibat korupsi saat mengerjakan proyek pemasangan tembok penahan Pasar Induk, di Kota Tebing Tinggi. Selain Gul Bahri, Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi juga menetapkan pelaksana proyek Wakil Direktur VII CV Rizky Mandiri Perkasa, Prio Handoko, sebagai tersangka. Berdasarkan penyidikan awalnya pelaku mengerjakan proyek senilai Rp 458 juta, dengan biaya APBD Kota Tebing Tinggi tahun 2019, Kemudian berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Utara. Populasi dalam penelitian adalah seluruh pegawai bagian keuangan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Tebing Tinggi. Sampel pada penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini sebanyak 75 responden. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode sampling jenuh. Sedangkan untuk uji asumsi klasik menggunakan Uji Normalitas, Multikolinearitas, Heteroskedastisitas, Autokorelasi. Dari semua pengujian, semua pertanyaan di dalam kuesioner dinyatakan valid dan reliabel. Selain itu teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dan pengujian hipotesis seperti Koefisien Determinasi (R²), Uji T dan Uji F. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh secara signifikan dengan arah negative terhadap pengelolaan keuangan daerah. Secara simultan akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah memerlukan akuntabilitas yang baik, transparansi yang efektif, dan kompetensi sumber daya manusia yang didukung oleh integritas dan pengawasan yang memadai.

Kata kunci: Audit; Jujur; Teras; Cakap; Kelola

1. LATAR BELAKANG

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya setelah diterapkannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Melalui desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan daerah, serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip *good governance*. Namun, dalam praktiknya pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti lemahnya pengawasan, rendahnya transparansi, dan terjadinya penyimpangan anggaran. Hal tersebut tercermin dari berbagai kasus korupsi yang melibatkan aparatur pemerintah daerah, salah satunya kasus korupsi proyek pembangunan tembok pasar di Kota Tebing Tinggi yang bersumber dari APBD tahun 2019. Kasus tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, terutama terkait akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi sumber daya manusia aparatur pemerintah.

Akuntabilitas menjadi faktor penting karena pemerintah daerah wajib mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat dan lembaga pengawas. Selain itu, transparansi diperlukan agar masyarakat memperoleh akses informasi yang jelas terkait pengelolaan APBD sehingga dapat mendorong pengawasan publik. Di sisi lain, kompetensi sumber daya manusia juga sangat menentukan keberhasilan pengelolaan keuangan daerah, karena aparatur yang memiliki pengetahuan, kemampuan, dan profesionalisme yang baik akan mampu mengelola anggaran secara tepat sesuai ketentuan yang berlaku. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda terkait faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan keuangan daerah. Penelitian oleh (Yulita et al., 2023) dan (Afriza, 2021) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Namun, penelitian (Afrianto et al., 2024) menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Pada variabel transparansi, penelitian (Hasugian et al., 2021) dan (Yulita et al., 2023) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Akan tetapi, penelitian (Esni et al., 2019) menemukan bahwa transparansi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, kompetensi sumber daya manusia juga dinilai memiliki pengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Penelitian (Simatupang et al., 2017) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah. Aparatur yang kompeten dinilai mampu

menyusun laporan keuangan dengan baik, memahami regulasi, serta mengelola anggaran secara profesional. Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena masih banyak ditemukan kasus penyimpangan pengelolaan keuangan daerah di Indonesia, termasuk kasus korupsi proyek pembangunan tembok pasar di Kota Tebing Tinggi dan OTT KPK di Pekanbaru. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi aparatur pemerintah daerah belum berjalan secara optimal. Gap penelitian terletak pada adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, penelitian sebelumnya umumnya dilakukan pada daerah atau instansi yang berbeda, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut pada konteks Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Tebing Tinggi.

2. KAJIAN TEORITIS

Jensen dan Meckling melakukan kajian mendalam pertama mengenai teori keagenan dalam artikel mereka yang ditulis pada tahun 1976 yang berjudul "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure." Menurut Jensen dan Meckling (1976) masalah keagenan muncul dari perbedaan antara pemilik dan pengendali di dalam suatu perusahaan, yang akhirnya memengaruhi nilai perusahaan. Mereka menegaskan bahwa teori agensi merupakan sebuah perjanjian antara manajer dan investor, di mana pemilik saham berperan sebagai prinsipal dan pengelola berfungsi sebagai agen. Pemilik saham merekrut manajemen untuk bertindak atas nama mereka. Akibatnya, manajemen memiliki wewenang untuk memutuskan apa yang terbaik bagi pemegang saham. Dalam konteks sektor publik, khususnya pemerintah daerah, masyarakat dapat diposisikan sebagai principal, sedangkan pemerintah daerah dan aparatur OPD berperan sebagai agent. Masyarakat sebagai pemilik kedaulatan menyerahkan mandat kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah melalui mekanisme APBD.

Menurut (Budi, 2020) hal. 07 Menjelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, akuntabilitas, dan pengawasan keuangan daerah. Pada setiap tahap manajemen ini, pemerintah daerah harus mematuhi standar dan proses untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi.

Menurut Mardiasmo (2018), Akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah untuk menyampaikan, melaporkan, dan mengungkapkan kepada pihak-pihak yang berhak untuk memperolehnya semua kegiatan dan tindakan yang berada di bawah wewenangnya. Dalam konteks pemerintahan daerah, akuntabilitas menuntut agar pemerintah daerah dapat

mempertanggungjawabkan seluruh proses dan hasil pengelolaan keuangan kepada masyarakat sebagai pemilik kedaulatan. Akuntabilitas lebih dari sekadar membuat laporan keuangan tahunan; hal itu juga mencakup penetapan tujuan yang jelas, pengukuran hasil kinerja, dan pelaksanaan evaluasi terhadap capaian program pembangunan. Hal ini sejalan dengan prinsip desentralisasi fiskal yang menekankan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap masyarakat.

Menurut UNDP (2021), transparansi mengacu pada penyediaan informasi yang dapat diakses, relevan, akurat, dan tepat waktu agar masyarakat mampu melakukan pengawasan serta evaluasi kinerja pada pemerintah. Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah memerlukan akses publik ke seluruh tahapan anggaran, mulai dari proses perencanaan dan pelaksanaan hingga tahap pelaporan, harus transparan. Masyarakat perlu memiliki akses untuk menilai apakah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagai instrumen keuangan utama di tingkat daerah, telah dikelola secara tepat dan efektif, sejalan dengan tujuan dan kebutuhan pembangunan. Transparansi APBD juga menghindarkan munculnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemanfaatan dana public.

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sebagaimana ditentukan oleh tempat kerja. Untuk mencapai kompetensi yang sesuai, seorang akuntan profesional harus memiliki pengetahuan profesional, keterampilan profesional, nilai-nilai, etika, dan sikap profesional. Kompetensi dapat didefinisikan sebagai ciri-ciri dasar individu yang memiliki hubungan sebab-akibat dengan standar yang digunakan sebagai referensi, kinerja yang efektif atau unggul di tempat kerja atau dalam keadaan tertentu, atau ciri-ciri dasar individu yang berkaitan dengan efektivitas kinerja pribadi dalam pekerjaan (Enita Binawati, 2022).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini difokuskan pada pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap pengelolaan keuangan daerah. Populasi dalam penelitian adalah seluruh pegawai bagian keuangan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Tebing Tinggi. Sampel pada penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini sebanyak 75 responden. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode sampling jenuh. Sedangkan untuk uji asumsi klasik menggunakan Uji Normalitas, Multikolinearitas, Heteroskedastisitas, Autokorelasi. Dari semua pengujian, semua pertanyaan di dalam kuesioner dinyatakan valid dan reliabel. Selain itu teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dan pengujian hipotesis seperti Koefisien Determinasi (R^2), Uji T dan Uji F.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengevaluasi apakah variabel independen dan dependen dalam analisis regresi mengikuti distribusi normal. Model regresi dianggap andal jika distribusi data normal atau mendekati normal.

Tabel 4. 1 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		75
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.22786941
Most Extreme Differences	Absolute	.074
	Positive	.074
	Negative	-.072
Test Statistic		.074
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

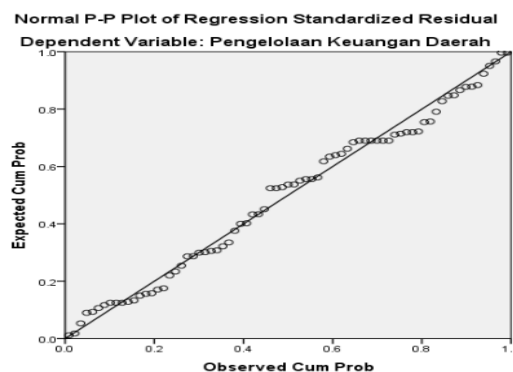
b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Output SPSS 25, (2026)

Hasil uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov* pada tabel 4.4 menampilkan nilai signifikansi sebesar 0,200 yang lebih besar dari nilai $\alpha = 0,05$. Hal ini menampilkan bahwa berdasarkan uji *Kolmogorov-Smirnov*, data tersebut dapat dianggap terdistribusi secara normal, sehingga asumsi normalitas dalam analisis regresi terpenuhi. Sehingga dapat ditampilkan Grafik Normalitas P-Plot data terdistribusi dengan normal, yaitu sebagai berikut:



Sumber: Output SPSS 25, (2026)

Gambar 4.A Hasil Uji Normalitas dengan Grafik Normalitas P-Plot

Berdasarkan pada gambar 4.A di atas dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal karena titik titik data menyebar berdekatan di sekitar garis diagonal dan menyebar mengikuti garis diagonal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a						Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients					
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	12.459	1.927		6.467	.000			
	Akuntabilitas	.593	.087	.830	6.850	.000	.386	2.594	
	Transparansi	.108	.065	.188	1.657	.102	.441	2.265	
	Kompetensi Sumber Daya Manusia	-.214	.096	-.275	-2.224	.029	.369	2.712	

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber: Output SPSS 25, (2026)

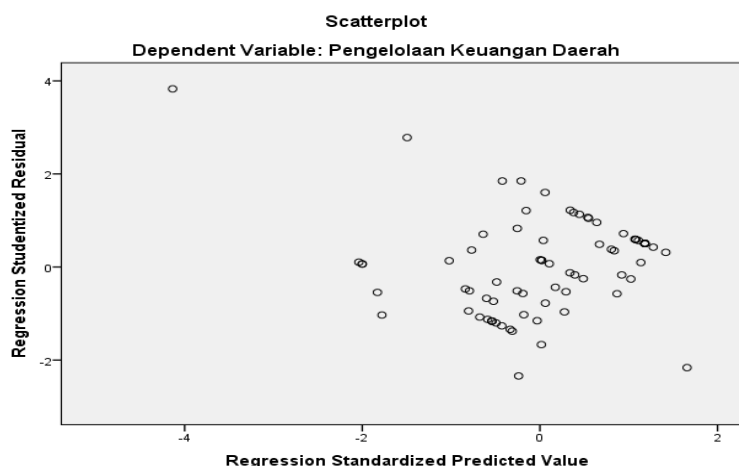
Berdasarkan tabel hasil uji multikolinearitas diatas menunjukkan nilai *Collinearity Tolerance* dan *Statistics VIF* masing masing variabel adalah sebagai berikut:

- Nilai *Collinearity Tolerance* variabel akuntabilitas sebesar $0,386 > 0,1$ dan nilai VIF $2,594 < 10$, maka disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinearitas pada variabel akuntabilitas.
- Nilai *Collinearity Tolerance* variabel transparansi sebesar $0,441 > 0,1$ dan nilai VIF $2,265 < 10$, maka disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinearitas pada variabel transparansi.
- Nilai *Collinearity Tolerance* variabel kompetensi sumber daya manusia sebesar $0,369 > 0,1$ dan nilai VIF $2,712 < 10$, maka disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinearitas pada variabel kompetensi sumber daya manusia.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah variasi dari residual berbeda antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah model yang tidak mengalami heteroskedastisitas. Pendekatan grafik dalam menguji

heteroskedastisitas pada penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan apakah titik-titik data tersebar, baik di atas maupun di bawah sumbu angka 0. Jika titik-titik data tidak berkumpul di satu tempat tertentu, maka disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Adapun hasil pengujian heteroskedastisitas melalui grafik scatterplot adalah sebagai berikut:



Sumber: Output SPSS 25, (2026)

Gambar 4.B Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplot

Terlihat jelas dari Gambar 4.3 bahwa titik-titik yang tersisa tidak membentuk pola tertentu dan tersebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak menunjukkan heteroskedastisitas, sehingga memenuhi persyaratan tradisional untuk analisis regresi linier berganda.

Uji Autokorelasi

Tabel 4. 3 Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	.14167
Cases < Test Value	37
Cases >= Test Value	38
Total Cases	75
Number of Runs	43
Z	1.048
Asymp. Sig. (2-tailed)	.295

a. Median

Sumber: Output SPSS 25, (2026)

Hasil uji autokorelasi dengan menggunakan uji *Run Test* menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,295. Nilai $0,295 > 0,05$ maka disimpulkan tidak terjadi autokorelasi pada model regresi linier berganda.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda pada penelitian ini dimanfaatkan untuk menilai dampak variabel independen seperti akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap variabel dependen yang dalam kajian ini adalah pengelolaan keuangan daerah. Hasil analisis regresi linier berganda yang dilakukan dengan program IBM SPSS versi 25 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	12.459	1.927		6.467	.000		
	Akuntabilitas	.593	.087	.830	6.850	.000	.386	2.594
	Transparansi	.108	.065	.188	1.657	.102	.441	2.265
	Kompetensi Sumber Daya Manusia	-.214	.096	-.275	-2.224	.029	.369	2.712

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber: Output SPSS 25, (2026)

Berdasarkan tabel 4.6 diatas diperoleh persamaan analisis regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 12,459 + 0,593X_1 + 0,108X_2 - 0,214X_3 + e$$

Adapun hasil interpretasi atas persamaan regresi linier berganda diatas yaitu:

A. Konstanta (α)

Nilai konstanta sebesar 12,459 (bernilai positif) mengindikasikan bahwa apabila variabel independen (akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi sumber daya manusia) dianggap konstan atau bernilai nol, maka nilai variabel dependen (pengelolaan keuangan daerah) diprediksi sebesar 12,459.

B. Akuntabilitas (X_1)

Nilai koefisien untuk variabel akuntabilitas adalah 0,593. Ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu unit akuntabilitas akan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,593 unit, dengan asumsi variabel lainnya tidak berubah. Ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berdampak positif pada pengelolaan keuangan daerah.

C. Transparansi (X2)

Koefisien pada variabel transparansi memiliki nilai 0,108. Ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu unit transparansi akan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,108 unit, dengan asumsi variabel lain tetap tidak berubah. Ini menunjukkan bahwa transparansi memiliki dampak positif, meskipun kontribusinya lebih kecil dibandingkan dengan akuntabilitas.

D. Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3)

Koefisien pada variabel kompetensi sumber daya manusia bernilai $-0,214$. Ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu unit dalam kompetensi SDM justru mengurangi pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,214 unit, dengan asumsi variabel lainnya tetap sama. Temuan ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh variabel kompetensi sumber daya manusia terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk menguji hipotesis pada model regresi, artinya pengujian ini dilakukan agar kita bisa mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil dari pengujian koefisien determinasi:

Tabel 4.5 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.774 ^a	.598	.581	1.890

a. Predictors: (Constant), Kompetensi Sumber Daya Manusia, Transparansi, Akuntabilitas

b. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber: Output SPSS 25, (2026)

Dari tabel 4.7 di atas, terlihat bahwa nilai R-square adalah 0,598 atau setara dengan 59,8%. Hal ini berarti bahwa variabel dependen, yaitu pengelolaan keuangan daerah, dapat

dijelaskan oleh variabel independen seperti akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi sumber daya manusia sebesar 59,8%, sedangkan 40,2% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya.

Uji Simultan (Uji F)

Uji Signifikansi Simultan, juga dikenal sebagai uji F, adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen dalam model regresi data panel secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. memiliki pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Berikut merupakan hasil pengujian dari uji simultan:

Tabel 4. 6 Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	377.754	3	125.918	35.263	.000 ^b
	Residual	253.526	71	3.571		
	Total	631.280	74			

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Daerah

b. Predictors: (Constant), Kompetensi Sumber Daya Manusia, Transparansi, Akuntabilitas

Sumber: Output SPSS 25, (2026)

Berdasarkan hasil uji simultan pada tabel 4.8 diperoleh nilai F hitung sebesar 35,263 > nilai F tabel sebesar 2,73, serta nilai signifikansinya sebesar 0,000 < 0,05. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa ketiga variabel independen yaitu akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi sumber daya manusia memengaruhi secara bersamaan terhadap variabel dependen yaitu pengelolaan keuangan daerah.

Uji Parsial (Uji T)

Tabel 4.7 Hasil Uji Parsial (Uji T)

Coefficients ^a								
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	12.459	1.927		6.467	.000		
	Akuntabilitas	.593	.087	.830	6.850	.000	.386	2.594
	Transparansi	.108	.065	.188	1.657	.102	.441	2.265
	Kompetensi Sumber Daya Manusia	-.214	.096	-.275	-2.224	.029	.369	2.712

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber: Output SPSS 25, (2026)

Nilai T tabel dihitung dengan $\alpha 5\%$ $df = n-k-1$ dimana n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel. Maka $df = 75-3-1 = 71$, sehingga diperoleh T tabel senilai 1,994. Berdasarkan hasil uji pada tabel diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- A. Berdasarkan hasil uji parsial pada variabel akuntabilitas diperoleh nilai T hitung 6,850 > T tabel 1,994 serta nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas secara individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
- B. Berdasarkan hasil uji parsial pada variabel transparansi diperoleh nilai T hitung sebesar 1,657 < T tabel 1,994 serta nilai signifikansi $0,102 > 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa transparansi secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil uji parsial pada variabel kompetensi sumber daya manusia diperoleh nilai T hitung -2,224 dengan nilai absolut > T tabel 1,994 serta nilai signifikansi $0,029 < 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia secara individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Pembahasan

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Hipotesis pertama menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap cara pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh bahwa variabel akuntabilitas memiliki nilai t hitung sebesar 6,850, yang lebih besar dari t tabel 1,994, dan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa akuntabilitas mempunyai dampak besar terhadap pengelolaan uang daerah. Berdasarkan hasil uji tersebut, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa akuntabilitas mempunyai pengaruh terhadap cara pengelolaan keuangan daerah dapat diterima. Hasil penelitian ini sebenarnya menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan keuangan daerah meningkat seiring dengan tingkat akuntabilitas yang diterapkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Akuntabilitas yang tinggi terlihat dari adanya kejelasan siapa yang bertanggung jawab, keakuratan dalam melaporkan keuangan, serta mematuhi semua aturan yang berlaku pada setiap tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan sampai pengelolaan akhir. Kondisi ini mendorong terciptanya pengelolaan keuangan yang lebih tertib, transparan, dan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik.

Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Hipotesis kedua menyatakan bahwa tingkat transparansi memengaruhi cara pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil uji hipotesis, ditemukan bahwa variabel transparansi memiliki nilai t hitung sebesar 1,657 yang lebih kecil dari nilai t tabel 1,994, serta nilai signifikansi sebesar 0,102 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel transparansi tidak memengaruhi secara nyata bagaimana pemerintah daerah mengelola keuangannya. Berdasarkan hasil uji tersebut, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah tidak dapat diterima (ditolak). Berdasarkan hasil penelitian ini, terlihat bahwa tingkat transparansi yang diterapkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Tebing Tinggi belum mampu memberikan dampak nyata terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah. Secara teori, transparansi artinya pemerintah membuka informasi mengenai pengelolaan uang kepada masyarakat. Namun dalam praktiknya, transparansi yang ada kemungkinan masih bersifat administratif atau formalitas semata, sehingga belum memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa kemampuan dan keterampilan para pegawai di daerah memengaruhi cara pengelolaan keuangan daerah tersebut. Berdasarkan hasil uji hipotesis, ditemukan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia (SDM) memiliki nilai t hitung sebesar -2,224 yang lebih besar dari t tabel 1,994 (dalam nilai absolut) dengan tingkat signifikansi 0,029 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan SDM memengaruhi pengelolaan keuangan daerah, tetapi dampaknya adalah negatif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa kompetensi SDM berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah diterima, tetapi dengan hubungan yang berlawanan arah. Secara teoritis, kompetensi sumber daya manusia mencerminkan Kemampuan para pegawai pemerintah menunjukkan seberapa baik mereka mampu melakukan tugas-tugasnya, yang mencakup pengetahuan, keterampilan, serta sikap profesional yang dimiliki. Dalam pengelolaan keuangan daerah, kemampuan tenaga kerja sangat penting di setiap proses, mulai dari membuat rencana anggaran, melakukan tindakan, mengurus keuangan, sampai membuat laporan dan memberikan pertanggungjawaban keuangan. Oleh karena itu, secara normatif diharapkan bahwa semakin tinggi kemampuan tenaga kerja, maka semakin baik pula kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut hipotesis keempat, pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi oleh akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi sumber daya manusia. Hasil uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah secara signifikan dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia, akuntabilitas, dan transparansi. Nilai signifikansi kurang dari 0,05 mendukung hipotesis keempat, yang menyatakan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi sumber daya manusia dalam manajemen keuangan daerah dapat diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa ketiga elemen tersebut memainkan fungsi simultan dalam manajemen keuangan regional. Untuk mencapai tata kelola keuangan regional yang efektif, akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi sumber daya manusia saling terkait. Proses manajemen keuangan regional, dari perencanaan dan pelaksanaan hingga pelaporan, akan lebih terarah, terorganisir, dan akuntabel ketika ketiga elemen ini bekerja bersama.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan penelitian berikut ini diambil dari temuan studi "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Manajemen Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Tebing Tinggi)" menggunakan pengujian data yang dilakukan dengan perangkat lunak SPSS 25:

- A. Akuntabilitas memiliki dampak positif dan penting terhadap cara pemerintah daerah mengelola uangnya. Hal ini menunjukkan bahwa baik standar pengelolaan keuangan daerah maupun tingkat akuntabilitas yang dijunjung tinggi oleh perwakilan pemerintah daerah semakin membaik. Akuntabilitas yang baik bisa membuat pengelolaan uang menjadi lebih rapi, jelas, dan bisa dipertanggungjawabkan.
- B. Transparansi tidak memengaruhi secara signifikan cara pemerintah daerah mengelola uangnya. Keterbukaan informasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum sepenuhnya membawa dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya meningkat meskipun pemerintah daerah sudah melakukan keterbukaan informasi. Transparansi yang ada biasanya hanya berupa prosedur formal dan belum digunakan dengan baik sebagai sarana pengawasan oleh masyarakat.
- C. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah dengan arah negatif. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi yang

dimiliki aparaturnya belum sepenuhnya diimplementasikan secara efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan kompetensi perlu diimbangi dengan integritas dan sistem pengawasan yang memadai agar dapat memberikan dampak positif.

- D. Akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi sumber daya manusia secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi dari ketiga faktor tersebut memengaruhi pengelolaan keuangan daerah. Dengan kata lain, akuntabilitas, keterbukaan, dan kompetensi sumber daya manusia harus bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan Hasil penelitian dan diskusi sebelumnya, penulis dapat memberikan rekomendasi berikut.:

- A. Peneliti berikutnya mungkin ingin mempertimbangkan untuk memasukkan variabel tambahan yang dapat berpengaruh pada pengelolaan keuangan daerah, seperti sistem pengawasan internal, keterlibatan masyarakat, atau penggunaan teknologi informasi.
- B. Peneliti berikutnya dapat juga mengembangkan fokus penelitian mereka ke lokasi yang lain atau menerapkan teknik penelitian yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang lebih lengkap.
- C. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan indikator yang berbeda dalam mengukur variabel penelitian, sehingga dapat memperoleh hasil temuan baru atau mempertegas hasil penelitian ini.
- D. Perangkat lunak analisis lain, seperti Eviews atau Stata, dapat digunakan oleh peneliti di masa mendatang. Namun, karena setiap alat menggunakan metode perhitungan yang berbeda, hasilnya mungkin berubah.

DAFTAR REFERENSI

- Yulita, R., Apriani, N., & Fitriyaningsih, S. D. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Kelurahan di Kecamatan Palu Timur. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 6(12), 1975–1982.
- Afriza, M. N. (2021). Analisis Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value for Money Dan Pengawasan Terhadap Realisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2020. *KINDAI*, 17(3), 438–445.
- Hasugian, F. T. S. P., Syahputra, R. A., & Harahap, A. R. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value For Money, Kejujuran, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kajian Pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Pusat). *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 6(2), 175–185.

- Esni, M. T., Made, A., & Wulandari, R. (2019). Analisis Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Malang. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 7(2).
- Pangaribuan, J., & Situmorang, H. H. (2024). Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Tranparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Batam. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 1–19.
- Meckling, W. H., & Jensen, M. C. (1976). *Theory of the Firm. Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*.
- Budi, M. (2020). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. PKN STAN.
- Enita Binawati, C. T. N. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal Optimal*, 19–39.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru*. Penerbit ANDI.
- KPK.go.id. (2024). *KPK Lakukan Penangkapan Terkait Korupsi Pengelolaan Anggaran di Pekanbaru*. Diakses Pada 07 September 2025.